



Collaborative Governance Berbasis Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan (Studi Kasus: Desa Wisata Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar)

1st Ida Ayu Dewi Indrayani^{*a}, 2nd Ni Putu Anik Prabawati^a, 3rd I Putu Dharmanu Yudartha^a

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: dy.indrayani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan *Collaborative Governance* Berbasis Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan (Studi Kasus: Desa Wisata Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis pada penelitian ini berdasarkan teori ukuran keberhasilan *collaborative governance* menurut DeSeve dalam Sudarmo, (2011). Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor pentahelix yakni pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis dan media sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan seperti masih adanya keterbatasan akan pemanfaatan sumber daya. Adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam menggali potensi pada bidang pariwisata serta masih kurang optimalnya metode pemasaran yang dilakukan dalam pengembangan desa wisata. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan yakni dari aktor pemerintah diharapkan lebih mengencangkan kembali kolaborasi pentahelix untuk tetap meningkatkan potensi sumber daya manusia. Diperlukan adanya sinergitas dalam membangun inovasi terkait promosi guna meningkatkan kembali pemasaran Desa Wisata Taro yang berkelanjutan. Mengupayakan keberlanjutan desa wisata dengan memperkuat dan merepresentasikan tagline Desa Wisata Taro yakni “An Eco-Spiritual Destination” dalam setiap program-program desa wisata.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Kolaborasi Pentahelix, Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan

Abstract

This research aims to find out the extent of implementation *Collaborative Governance Based on Pentahelix in Sustainable Tourism Village Development* (Case Study: Taro Tourism Village, Tegallalang District, Gianyar Regency). In this research, the author used a qualitative research method with a descriptive approach. The analysis in this research is based on success measurement theory *collaborative governance* according to DeSeve in Sudarmo, (2011). The results of the research findings show that collaboration between pentahelix actors, namely government, academics, community, business and media has gone quite well, but there are still several things that are problems, such as limitations in resource utilization. There are limited human resources in exploring potential in the tourism sector and the marketing methods used in developing tourist villages are still less than optimal. The recommendations that can be given are from government actors who are expected to further intensify pentahelix collaboration to continue increasing human resource potential. There is a need for synergy in developing promotion-related innovations to improve sustainable marketing of the Taro Tourism Village. Striving for the sustainability of tourist villages by strengthening and representing them tagline Taro Tourism Village is “An Eco-Spiritual Destination” in every tourism village program.

Keywords: *Collaborative Governance*, Pentahelix Collaboration, Sustainable Tourism Village Development

1. Pendahuluan

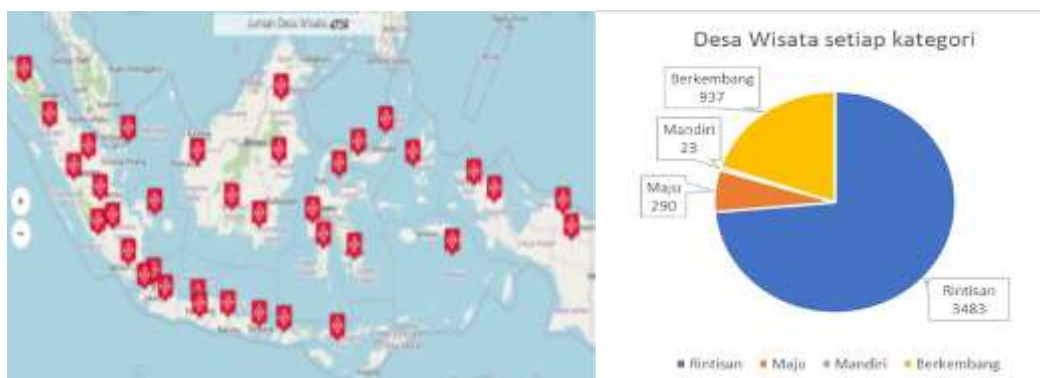
Pariwisata merupakan sektor dengan dampak sangat signifikan dalam perkembangan ekonomi, sosial serta budaya dari suatu negara. Sektor pariwisata sebagai salah satu penyumbang devisa utama serta sebagai penunpu perekonomian nasional (Purwowidhu, 2023). Sering kali pariwisata dijuluki sebagai katalisator pembangunan, dimana hal ini mengacu berdasarkan potensi dari sektor pariwisata dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan berimplikasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Rosardi, R.G., 2020).

Pariwisata dengan berbagai aspek positifnya, tentu diiringi pula dengan perhatian pemerintah dimana memfokuskan terhadap pengembangan dalam sektor pariwisata guna berperan sebagai ujung tombak keunggulan negara dalam mensejahterakan masyarakatnya. Perhatian pemerintah terhadap pengembangan sektor pariwisata salah satunya tercermin berdasarkan kebijakan pemerintah dengan memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan desa wisata. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran dalam hal meningkatkan potensi dari pariwisata. Peran pemerintah daerah tersebut selaras mulai dari memberikan ruang, mengencangkan investasi, mengembangkan sektor pariwisata, mengelola destinasi pariwisata serta mengalokasikan dana guna meningkatkan potensi pariwisata.

Salah satu bentuk implementasi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi pariwisata yakni melalui pengembangan desa wisata. Sesuai pula berdasarkan konsep dalam membangun secara merata dari daerah terpencil seperti desa guna mensejahterakan bagi penduduk Indonesia melalui upaya mengeksplorasi potensi daerah serta memberdayakan masyarakat lokal. Dimana hal tersebut merupakan Program pemerintah yang dicanangkan sebagai program prioritas berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dikatakan bahwa pemerintah tingkat desa memiliki kewenangan atau otonomi sendiri dalam manajemen sumber daya serta arah pembangunan daerahnya masing-masing (Kemenkomarves, 2021).

Destinasi wisata dengan basis komunitas masyarakat berlandaskan kearifan lokal dan kultural masyarakatnya merupakan potensi yang dimiliki oleh desa. Dimana hal tersebut, mampu menjadi pemantik peningkatan perekonomian dengan berprinsip gotong royong dan keberlanjutan (Kemenkomarves, 2021). Dalam upaya memacu potensi pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah dan pembukaan lowongan pekerjaan desa wisata memiliki peran penting akan hal ini. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, mengamanatkan desa wisata secara terpadu menjadi upaya dalam merealisasikan transformasi ekonomi, sosial budaya dalam mewujudkan kemandirian desa. Selaras dengan itu, ditargetkan pula dalam RPJMN 2020-2024 sebanyak 244 desa wisata hingga tahun 2024 dapat terverifikasi sebagai desa wisata mandiri.

Gambar 1 Jumlah Desa Wisata dan Kategori Desa Wisata per September 2023



Sumber: Data diolah dari Jaringan Desa Wisata Kemenparekraf

Berdasarkan data diatas terlihat per September tahun 2023 terdapat 4.732 desa wisata di Indonesia. Jumlah tersebut terlihat bertambah 31 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 terdapat sebanyak 3.613 desa wisata. Meningkatnya jumlah desa wisata diharapkan dapat memaksimalkan pengembangan potensi pariwisata masing-masing desa wisata. Kemudian, dilihat berdasarkan kategori desa wisata terdapat sebanyak 3483 dalam kategori rintisan, 937 kategori berkembang, 290 kategori maju serta 23 kategori mandiri. Tentunya, dengan angka kategori desa wisata saat ini menunjukkan bahwa, masih diperlukan adanya pemaksimalan dalam pengembangan desa wisata agar mencapai target sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dengan 244 desa wisata pada tahun 2023 dapat terverifikasi menjadi desa wisata mandiri.

Dalam RPJMN 2020-2024 juga mengamanatkan konsep *sustainability* atau keberlanjutan, dimana dalam pengarusutamaan keberlanjutan memfokuskan pada pembangunan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan target keberhasilan TPB/SDGs di semua sektor dengan didalamnya termasuk pada bidang pariwisata (Fasa, et.al., 2022). Perhatian pemerintah terhadap sektor pariwisata yang berkelanjutan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Dalam pertumbuhan desa wisata yang berkelanjutan ditujukan guna meningkatkan potensi desa mulai dari sumber daya alam, seni dan budaya, serta bagaimana kegiatan sosial

masyarakat yang terbentuk di dalamnya guna memberikan kontribusi bagi perekonomian desa sekaligus mensejahterakan masyarakat (Pugra, et.al., 2021). Desa wisata menjadi daya tarik dengan karakteristik autentik dari daerahnya yang membedakan dengan desa wisata lain. Dengan dilengkapi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata mampu memberikan daya jual terhadap wisatawan.

Menarik disini, Kabupaten Gianyar merupakan daerah pariwisata dengan beragam potensi wisata yang dimilikinya. Hampir semua jenis pariwisata berkembang di daerah ini, mulai dari keunikan sumber daya alam, keunikan budaya, seni dan tradisi masyarakatnya, serta kegiatan kreatif kerajinan tangan menjadi sangat kompleks mendukung pengembangan daerah pariwisata. Dengan beragam keunikan yang dimiliki menjadikan daerah ini berkembang sangat pesat dan diminati wisatawan (Bargandini, et al., 2022). Pariwisata di Kabupaten Gianyar terlihat optimal dimana terlihat dari berbagai program yang diterapkan oleh Kabupaten Gianyar dengan mengacu pada UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Terapan usaha Kabupaten Gianyar dalam mendorong potensi wisata yakni melalui pengembangan desa wisata di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang. Desa Taro telah menjadi desa wisata pada tahun 2017 berdasarkan SK Bupati Nomor 429/E02/HK/2017 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Gianyar.

Desa Taro memiliki potensi mulai dari beragam budaya dengan keunikan sejarah, serta berbagai pesona alam, dimana menjadi modal besar bagi pengembangan suatu desa yang dapat menjadi objek wisata. Desa Taro merupakan desa tua di Bali dengan beragam cerita sejarah serta kearifan lokal yang terawat dengan baik sampai saat ini. Desa wisata ini mengusung tagline “*An Eco-Spiritual Destination*” yaitu suatu destinasi yang berbasis alam dan nilai spiritualitas yang kuat. Suasana di Desa Taro yang begitu tenang dan rindang dengan potensi alam yang kuat terkesan asri bernuansa hijau, udara yang sejuk dengan hutan desa yang masih terjaga. Selain itu, tidak kalah menarik dimana mampu menarik wisatawan yakni tempat tinggal warga lokal di Desa Taro bercirikan rumah tradisional adat Bali serta budaya yang masih sangat kental.

Mayoritas masyarakat Desa Taro bekerja dibidang pertanian, dimana Desa Taro terkenal dengan cikal bakal lahirnya sistem subak di Bali. Terdapat pula beragam kegiatan masyarakat yang turut mendukung kegiatan pariwisata seperti contoh Desa Taro yang juga terkenal dengan pengrajin paras dan kerajinan tangan lainnya. Selain pariwisata yang ditawarkan dengan konsep keaslian alam, budaya dan kehidupan masyarakat pedesaan, terdapat pula berbagai atraksi buatan sebagai penunjang kegiatan pariwisata. Atraksi tersebut seperti bersepeda, *tracking*, *farming* dan sejenisnya yang tetap berorientasi pada aktivitas keseharian di desa dalam menikmati keindahan alam di Desa Taro. Potensi wisata di Desa Taro didukung pula dengan lokasinya yang strategis dimana menjadi penghubung kawasan wisata Ubud dan Kintamani.

Gambar 1 Proses Kelembagaan di Desa Wisata Taro



Sumber: Pemerintah Desa Taro

Ditilik berdasarkan proses kelembagaan seperti gambar diatas, terlihat bahwa pengembangan Desa Wisata Taro bermula dari tahun 2015 dimana berdasarkan Musyawarah Desa mulai memperhatikan potensi pariwisata dengan diawali terbentuknya kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Pada saat ini, Pokdarwis bersama relawan masyarakat lebih memfokuskan terkait bagaimana melindungi aset, potensi dan peninggalan sejarah yang ada. Di tahun 2016 mulai digarap program Bank Sampah sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat agar tidak mencemari lingkungan dengan membakar sampah sembarangan maupun membuang ke sungai. Daya tarik wisata (DTW) baik pribadi maupun kelompok mulai dikunjungi oleh wisatawan, maka kegiatan pariwisata mulai terjadi di Desa Taro.

Tahun 2017, Desa Taro telah ditetapkan sebagai desa wisata yang kemudian pemerintah mulai memberikan pelatihan dan program pendampingan terkait kepariwisataan. Dengan bagini, pemerintah Desa Taro juga menaruh perhatian dalam mengembangkan desa wisata dimana mulai dilakukannya penataan objek wisata pada tahun 2018. Di Tahun 2019, mulai dibuat perjanjian kerja sama dengan semua DTW, *homestay* serta sarana pariwisata lainnya. Selanjutnya, melalui program pembangunan desa, mulai meningkatkan kegiatan Bank Sampah menjadi lebih komprehensif sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dengan konsep *reduce-reuse-recycle*. Dilanjutkan pada tahun 2021, Desa Taro terus melakukan inovasi dengan mengoptimalkan pertanian organik, pengolahan pupuk dan residu.

Tabel 1 Data Kunjungan dan Pendapatan Desa Wisata Taro Tahun 2019-2023

Tahun	Desa Wisata Taro Jumlah Kunjungan	Jumlah Pendapatan
2019	10.000	10.000.000
2020	15.000	15.000.000
2021	8.665	8.665.000
2022	7.704	7.704.000
2023	11.498	25.846.500

Sumber: Data diolah dari Bumdes Sarwa Ada Desa Taro, 2024

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Taro dari tahun 2019 hingga 2023 adanya pergerakan dari jumlah wisatawan yang berkunjung, hal tersebut menandakan bahwa potensi wisata yang ada di Desa Taro mampu menarik wisatawan untuk berkunjung. Terlebih dari jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan desa Wisata di Desa Taro turut berimplikasi positif terhadap perekonomian masyarakat lokal dan mampu menambah Pendapatan Asli Desa (PADesa). Mengingat bahwa pengembangan desa wisata mampu menghasilkan manfaat ganda bahkan berlipat-lipat bagi banyak pihak baik pemerintah dan masyarakat jika dikelola dengan baik. Tentunya, dalam pengembangan Desa Wisata Taro juga berproses mengikuti dinamika yang melibatkan berbagai pihak sejak dicetuskannya Desa Taro sebagai Desa Wisata (Warka, et al., 2022).

Dalam upaya pengembangan desa wisata, Pemerintah Desa Taro menyadari bahwa dibutuhkannya kemampuan manajemen dan administrasi dengan pendekatan kritis dan analitis dimana mengharuskan desa wisata mampu berkolaborasi bersama lima unsur pentahelix untuk meningkatkan kualitas jangka panjang (Warka, et al., 2022). Dalam memaksimalkan pengembangan potensi wisata, kolaborasi pentahelix menjadi strategi bagi desa wisata. Adapun yang menjadi unsur pentahelix diantaranya Pemerintah, Komunitas, Bisnis/Usaha, Akademisi, dan Media sebagai katalisator (Kemenkomarves, 2021). Kolaborasi Pentahelix merupakan salah satu konsep dari *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata. Ansell dan Gash dalam (Hardi, W., 2020) memberikan pemahaman bahwa *collaborative governance* yakni proses tata kelola pemerintah dengan melibatkan secara langsung *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik diluar pemerintahan maupun negara, dimana berorientasi terhadap proses musyawarah pengambilan suatu keputusan secara kolektif dengan tujuan guna membuat maupun melaksanakan suatu kebijakan maupun program-program publik. Dalam pengembangan desa wisata, optimalisasi kolaborasi antar sektor menjadi penentu dari keberhasilan pengelolaan desa wisata dalam mendorong pengembangan dari desa wisata rintisan, berkembang dan maju menjadi desa wisata mandiri dan berkelanjutan (Yuniar, N., 2021).

Pengembangan Desa Wisata Taro dengan basis pariwisata alam, budaya dan masyarakat lokal setempat, guna mencapai jangkauan yang lebih panjang sangat diperlukannya sinergitas antar aktor pentahelix. Gambaran dari kolaborasi pentahelix dalam pengembangan Desa Wisata Taro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Pola Kemitraan dan Pihak yang Bekerjasama dalam Kolaborasi Pentahelix

Elemen Pentahelix	Pola Kemitraan	Pihak yang Bekerjasama
Pemerintah	Pembinaan, Bantuan, Program Pembangunan	Disparda, DLH, dan OPD lainnya di Kabupaten Gianyar
Komunitas	Pendampingan dan Pelatihan dari Asosiasi	Forkomdewi Provinsi Bali, Yayasan Bumi Sasmaya, MASATA Bali, Komunitas Chef dan Komunitas Masyarakat lainnya
Bisnis/Usaha	Pemasaran Desa Wisata	PT PLN, PELINDO, Bank BPD Bali, Padma Resort Ubud, The Kayon dan lainnya

Akademik	Pelatihan, Penelitian, Poltekpar Bali, Univ Udayana, Univ Triatma
Media	Magang Mahasiswa Mulya, IPB dan lainnya
	Promosi dan Pemberitaan Dueg Creative Channel, Bali TV dan lainnya

Sumber : Bumdes Sarwa Ada Desa Taro, 2023

Kolaborasi pentahelix yang terjalin dalam pengembangan Desa Wisata Taro terlihat sebagai strategi yang tepat dalam pengembangan desa wisata. Keberhasilan pengembangan Desa Wisata Taro sejauh ini dapat dilihat berdasarkan prestasinya, dimana Desa Taro telah menyandang desa wisata dengan predikat maju dan termasuk dalam 500 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) di tahun 2023 (Kemenparekraf, 2023). Desa Taro juga mendapatkan Kalpataru Kategori Penyelamatan Lingkungan Hidup dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2018 serta telah tersertifikasi sebagai Desa Wisata Berkelanjutan pada tahun 2021 yang berlaku hingga tahun 2024 (Ardika, 2023). Bukan hanya itu, Desa Taro menjadi salah satu dari tiga desa bersama Desa Bilebante (NTB) dan Desa Pela (Kalimantan Timur) yang masuk dalam *upgrade programme* untuk dipersiapkan menjadi *Best Tourism Villages* UNWTO di periode selanjutnya (Hendriyani, 2023).

Berbagai prestasi yang didapatkan Desa Wisata Taro semestinya semakin menjadi pemantik dalam optimalisasi pengembangan potensi desa secara konsisten dan kontinyu. Kendati demikian, tentunya dalam pengelolaan Desa Wisata Taro tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan observasi langsung dan wawancara bersama Bapak I Wayan Warka selaku Kepala Desa Taro pada 4 Oktober 2023, adapun yang menjadi permasalahan dalam pengembangan Desa Wisata Taro diantaranya: Pertama, keterbatasan Sumber Daya Manusia. SDM masih menjadi tantangan dalam pengembangan desa wisata baik dalam kapabilitas kompetensinya dalam bidang pariwisata yang belum optimal. Selain itu, terlihat banyak masyarakat Desa Taro terutama anak muda yang lebih memilih bekerja ke luar daerah bahkan keluar negeri dan enggan untuk bekerja di Desa. Kedua, minim fasilitas dan infrastruktur. Sudah terdapat fasilitas umum untuk menunjang pariwisata di Desa Taro sejauh ini seperti penginapan, toilet umum, area parkir, tempat makan dan lainnya. Tetapi masih belum optimal dimana fasilitas masih diperlukannya peningkatan kuantitas fasilitas guna menunjang kegiatan wisata di seluruh objek wisata. Terlihat bahwa akses menuju Desa Taro saat ini masih belum bisa dilalui oleh transportasi dengan kapasitas besar seperti bus ataupun kendaraan besar, berpengaruh terhadap akses wisatawan yang berkunjung ke Desa Taro.

Ketiga, masih terdapat masyarakat yang kurang sadar akan pengelolaan sampah dan kesulitan dalam pengelolaan limbah ternak babi. Walaupun desa ini telah berinovasi dalam pengelolaan sampah mulai dari program Bank Sampah sampai inovasi pengelolaan sampah berbasis sumber TPS3R, masih terdapat masyarakat yang kurang sadar dan malah membuang ataupun membakar sampah sembarangan. Selain itu, sebagian masyarakat Desa Taro juga banyak yang memiliki hewan ternak seperti babi. Kotoran ternak ini banyak dibuang sembarangan hingga ke sungai yang mana berindikasi mencemari lingkungan. Terakhir, kurang optimalnya pemasaran dan promosi yang dilakukan. Desa Taro dengan beragam potensinya dan penghargaan yang telah didapatkan dalam pengembangan desa wisata namun masih terkendala terkait pemasaran wisatanya. Walaupun adanya pergerakan jumlah wisatawan di setiap tahunnya, namun jumlah kunjungan tersebut masih belum memenuhi dari yang ditargetkan oleh Pokdarwis.

Melihat berbagai kendala yang dihadapi, tentunya dalam menghadapi permasalahan diatas tidak hanya dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja. Melainkan, diperlukan adanya sinergitas antar unsur pentahelix dalam pengelolaan desa guna mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan. Penelitian ini menjadi menarik untuk dibahas, dimana penelitian ini akan melihat bagaimana kolaborasi dari aktor pentahelix dalam pengembangan desa wisata dalam mewujudkan desa wisata berkelanjutan di Desa Taro. Dilihat berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan *Collaborative Governance* Berbasis Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan (Studi Kasus: Desa Wisata Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2009), adalah suatu jenis penelitian yang mengeksplorasi kondisi alamiah dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang telah terkumpul. Penelitian ini bersifat induktif dan menggunakan pendekatan pemikiran positif, dengan penekanan pada penggalan makna (Karman et.al, 2021). Kemudian, pendekatan deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan guna memberikan gambaran solusi

terhadap masalah yang ada saat ini berdasarkan data. Dengan pendekatan ini, informasi disajikan, dianalisis, dan diinterpretasi, serta bersifat komparatif dan korelatif (Wulandari et.al, 2019).

Penelitian ini menggunakan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Sugiyono (2018) mengartikan bahwa data primer merupakan sumber data yang memberikan secara langsung data terhadap pengumpul data. Data yang didapatkan pada penelitian ini yakni dengan wawancara maupun observasi di Desa Wisata Taro. Sugiyono (2018) mengartikan data sekunder sebagai data yang didapat secara tidak langsung seperti halnya melalui orang lain, dokumen, ataupun media. Data sekunder yang didapat bersumber dari studi pustaka baik berupa, skripsi, tesis, data dari penelitian terdahulu, termasuk pula berbagai data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan data yang bersumber dari internet untuk melengkapi data-data yang diperlukan terkait kolaborasi pentahelix dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan di Desa Taro

Menurut Abdussamad, Z. (2022) unit analisis atau unit observasi, merupakan unit dasar yang dijadikan objek observasi dalam penelitian. Objek penelitian dapat berupa individu, organisasi, kelompok, tempat, benda, dan lain sebagainya sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti. Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka penulis menetapkan individu bagian dari aktor kolaborasi pentahelix dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan di Desa Taro sebagai unit analisis penelitian ini.

Lokasi penelitian adalah tempat penulis melaksanakan penelitian tentang informasi maupun situasi yang sebenarnya dari suatu objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Wisata Taro. Lokasi penelitian ini dipilih dengan harapan mampu memberikan informasi terkait apa yang penulis butuhkan, sehingga nantinya dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada di lokasi penelitian.

Informan merupakan individu sebagai penyedia informasi terkait situasi serta kondisi dari latar belakang penelitian, seperti lokasi ataupun tempat penelitian tersebut (Nasution, 2023). *Purposive sampling* digunakan sebagai penentu informan dalam penelitian ini. *Purposive sampling* ialah penentuan sumber data dengan mempertimbangkan terlebih dahulu, dimana informan dipilih sesuai dengan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian.

Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dan karakteristik unik dari objek penelitian, di mana teknik analisis data difokuskan untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesamaan melalui analisis perbandingan (Nasution, 2023). Proses analisis data kualitatif melibatkan pemilihan, penyaringan, dan organisasi data yang dikumpulkan dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, makna, keunikan, serta temuan baru yang bersifat deskriptif, kategorisasi, dan/atau pola hubungan antar kategori dari objek penelitian.

3. Pembahasan

Dalam menganalisis hasil temuan dalam penelitian yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* Berbasis Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar menggunakan teori *Collaborative Governance*. Dalam *Collaborative Governance* terdapat indikator-indikator yang dikemukakan oleh DeSeve dalam Sudarmo, (2011) guna mengukur keberhasilan dari suatu kolaborasi dalam *governance*, antara lain (1) *Networked Structure*, (2) *Commitment to a Common Purpose*, (3) *Trust Among The Participants*, (4) *Governance*, (5) *Access to Authority*, (6) *Distributive Accountability / Responsibility*, (7) *Information Sharing*, (8) *Access to Resources*. Berikut ini penjabaran berdasarkan hasil analisis temuan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur.

Indikator *Networked Structure* (Struktur Jaringan)

Network structure merupakan keadaan dimana terdapat keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya dan secara bersama menggambarkan unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Dalam pemerintahan kolaboratif, unsur jaringan tidak boleh membentuk hierarki yaitu adanya kekuasaan tertinggi dari salah satu pihak. Jadi, dalam pemerintahan kolaboratif jaringan harus bersifat organis dengan struktur jaringan yang terlibat yakni tidak ada hierarki kekuasaan, dominasi, dan monopoli. Seluruh pihak memiliki hak yang sama, kewajiban,

tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam mencapai tujuan bersama (Deseve dalam Sudarmo, 2011).

Dalam pengembangan Desa Wisata Taro dimana pemerintah desa melalui lembaga desa yakni Bumdes Sarwa Ada dengan unit usaha desa wisata sebagai penginisiasi adanya kerja sama dalam proses pengembangan desa wisata. Kelembagaan desa yakni Pokdarwis Desa Taro sebagai penggerak aktivitas pariwisata di Desa Taro. Kemudian, daerah tujuan wisata (DTW) di Desa Taro sebagian besar dimiliki dan digerakan oleh masyarakat lokal baik pribadi maupun komunitas masyarakat. Dalam pengembangannya, turut pula terdapat peran akademisi dalam memberikan sumbangsih pemikiran terkait pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Bisnis berperan dalam hal pemasaran produk wisata, memperkenalkan Desa Wisata Taro dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Terakhir, media berperan sebagai katalisator dalam pengembangan desa wisata dimana berperan dalam membangun branding dan mempromosikan Desa Wisata Taro.

Tabel 3 Klasifikasi Peran Aktor Pentahelix

No	Aktor Pentahelix	Peran
1	Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa)	Peraturan dan perizinan kerja sama dalam pengembangan Desa Wisata, Pendampingan dan pelatihan terkait kepariwisataan, Pemberian fasilitas pendukung kegiatan kepariwisataan.
2	Akademisi (Konsultan Pengembangan Desa Wisata, pihak-pihak universitas)	Melakukan studi dan penelitian, memberikan masukan dan evaluasi dari program-program yang dijalankan dalam pengembangan desa wisata. Memberikan pemberdayaan dan pelatihan bagi masyarakat.
3	Komunitas (Yayasan Bumi Sasmaya, Pengelola tegal Dukuh Camp)	Mengoptimalkan sumber daya di Desa Taro dalam pengembangan Desa Wisata dan sebagai pelaku dari kegiatan desa wisata serta menjual produk wisata. Selain itu, komunitas berperan dalam memastikan keberlanjutan dari desa wisata dengan tetap menjaga alam dan lingkungan Desa Taro.
4	Bisnis (Mason Elephant Park & Lodge, Perbankan seperti BCA, Sinarmas, BPD dll)	Membuka lapangan pekerjaan dan memperkenalkan Desa Wisata ke wisatawan dan menjual produk dari desa wisata
5	Media (Dueg Creative Channel)	Membangun <i>branding</i> desa wisata, mempromosikan desa wisata, sebagai bentuk transparansi dari program-program kegiatan desa wisata

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam *collaborative governance* berbasis pentahelix dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan studi kasus di Desa Wisata Taro menunjukkan telah terbentuk struktur jaringan yang tegas. Setiap aktor pentahelix memiliki peranan yang berbeda-beda sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Baik dari pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis dan media telah menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan tupoksi yang disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kolaborasi tidak adanya hirarki kekuasaan atau salah satu pihak yang mendominasi.

Indikator *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen untuk Tujuan Bersama)

Commitment to a common purpose menjadi alasan utama mengapa jaringan harus ada. Hal ini disebabkan oleh perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan yang positif dilakukan secara bersama. Tujuan ini sering ditemukan pada misi umum suatu organisasi pemerintah. Selain itu, komitmen yang dibuat tidak boleh memihak salah satu *stakeholder* atau pemangku kepentingan kebijakan. Karena hal tersebut dapat disalah artikan menjadi kolaborasi yang terjalin hanya untuk menguntungkan salah satu pihak. Dalam kondisi seperti ini, komitmen yang terlibat dalam pemerintahan kolaboratif harus untuk kepentingan bersama melalui pencarian solusi bersama (DeSeve dalam Sudarmo, 2011).

Dalam pengembangan desa wisata di Desa Taro tentunya tidak terlepas dari konsep Tri Hita Karana dan dengan *tagline* desa wisatanya yakni *An Eco-Spiritual Destination*. Keberagaman potensi sumber daya yang dimiliki haruslah dijaga dengan baik guna mewujudkan keberlanjutan. Tidak terlepas pula bagaimana pemanfaatan sumber daya tersebut guna memberikan dampak kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan demikian, hendaknya seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam *Collaborative Governance* Berbasis Pentahelix dengan melibatkan

lima aktor pentahelix yakni pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis dan media haruslah memiliki kesamaan tujuan atau komitmen yang sama dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan di Desa Taro.

Tujuan dalam pengembangan Desa Wisata Taro harus sejalan dengan seluruh aktor yang terlibat sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Hendaknya, komitmen tersebut tidak menguntungkan salah satu pihak ataupun *stakeholder* yang bersangkutan melainkan setiap aktor mendapatkan manfaatnya masing-masing. Sejauh ini terlihat bahwa seluruh pihak yang bekerjasama memiliki tujuan yang sama yakni pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Dengan menggali seoptimal-optimalnya potensi desa yang dimiliki dimana setiap aktor dengan peranannya masing-masing berjalan sesuai kewenangan dan apa yang telah disepakati dengan *output* keuntungan masing-masing aktor. Komitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam kolaborasi pentahelix pada pengembangan desa wisata berkelanjutan di Desa Taro turut dikuatkan dari adanya kerja sama baik secara *gentle agreement* maupun kerja sama tertulis berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) ataupun *memorandum of understanding* (MoU).

Indikator *Trust Among the Participants* (Kepercayaan di antara Para Peserta)

Trust among the participants merupakan hubungan profesional dimana para partisipan memberikan kepercayaannya mengenai informasi dan usaha dari *stakeholder* dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu, setiap *stakeholder* harus saling percaya sebagai bentuk hubungan profesional yang terjalin dalam keberhasilan pelaksanaan pemerintahan kolaboratif (Deseve dalam Sudarmo, 2011). Dalam kolaborasi yang dimaksud yaitu antar seluruh aktor pentahelix yakni pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis dan media yang harus memiliki rasa kepercayaan bersama-sama mengembangkan desa wisata yang berkelanjutan di Desa Taro. Kepercayaan yang terbangun dalam pelaksanaan kolaborasi ini harus mencakup semua aspek utamanya yakni kepercayaan akan kinerja dari masing-masing aktor yang terlibat didalamnya serta memastikan keberlanjutan dalam prosesnya.

Terlihat bahwasannya kepercayaan yang terjalin antar aktor pentahelix tercermin berdasarkan hubungan profesionalisme. Kepercayaan yang saling keterkaitan antara aktor pentahelix membentuk hubungan profesional dalam menjalankan program atau tugas dan fungsi masing-masing. Pemerintah desa sebagai penginisiasi adanya kolaborasi dengan sepenuhnya memberikan kepercayaan bagi *stakeholder* yang terlibat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan pengembangan. Seperti halnya, pihak akademisi dalam menjalankan fungsinya yakni riset atau penelitian, pendampingan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat akan tetap berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak pemerintah desa serta memberikan pertanggungjawaban dari program yang dijalankan dengan memberikan output berupa laporan atau hasil penelitian dalam bentuk ilmiah. Aktor Komunitas masyarakat dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak kegiatan wisata di Desa Taro akan diperhatikan oleh pemerintah dengan diberikan dampingan dan pengelola komunitas telah memahami apa yang menjadi tanggung jawab mereka seperti contoh melaporkan progres masing-masing komunitas ke pemerintah desa melalui Bumdes Sarwa Ada Desa Taro. Selanjutnya untuk aktor bisnis seperti yang dilakukan oleh Mason Elephant Park & Lodge telah memahami dan menghormati apa yang menjadi kesepakatan mereka dengan desa adat. Adanya keterbukaan dalam kesepakatan bagi hasil pendapatan dan memberikan CSR ke desa dinas sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Begitu pula yang dilakukan oleh aktor media yang senantiasa turut bergerak mengembangkan desa wisata melalui konten-konten yang di publish baik media sosial maupun penyiaran televisi. Dengan keseluruhannya, kepercayaan yang terbangun di antara para peserta mengacu terhadap apa yang telah disepakati bersama sesuai dengan kewenangan masing-masing aktor pentahelix. Begitu pula masing-masing pihak atau aktor pentahelix yang bekerjasama menjaga kepercayaan tersebut dengan menjalankan program masing-masing dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah desa.

Indikator *Governance* (Pemerintah)

Governance dalam pelaksanaan kolaborasi diartikan sebagai batasan siapa saja yang boleh terlibat dan siapa yang tidak boleh terlibat, aturan mengenai batasan tindakan atau perilaku pada *stakeholder* yang ada di dalamnya, kebebasan bagaimana kolaborasi harus dijalankan, manajemen jaringan yang mencakup pada resolusi penolakan atau tantangan, alokasi sumber daya, dan kontrol kualitas, serta pemeliharaan organisasi (DeSeve dalam Sudarmo, 2011). Dalam kolaborasi antar aktor pentahelix di Desa Wisata Taro hingga saat ini, kerja sama tersebut ada yang telah dituangkan dalam *memorandum of understanding* (MoU) atau kerjasama tertulis maupun kerjasama tidak tertulis atau *gentle agreement* sesuai dengan program-program yang diselenggarakan.

Dalam pengelolaan desa wisata, Pemerintah Desa Taro selalu berlandaskan pada aturan yang berlaku serta dalam perencanaan program. Seperti halnya penggunaan APBDesa, terlihat sudah adanya keterbukaan dan transparansi dengan tetap melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Selain itu, kerja sama kolaborasi yang terjalin dalam pengembangan desa wisata dimana pihak-pihak yang terlibat mengetahui terkait apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan dalam bekerjasama. Adanya transparansi dan akuntabilitas dimana terlihat dari adanya keterbukaan dalam program-program yang dijalankan dengan tetap berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa sebagai penginisiasi kerja sama. Beberapa kerja sama dalam pengembangan desa wisata dengan aktor pentahelix telah memiliki legalitas kerja sama berupa PKS maupun MoU yang telah disepakati dan bersifat konfidensial antara pihak desa dengan *stakeholder* yang bekerjasama. Terdapat pula kerja sama secara lisan atau *gentle agreement* dengan beberapa pihak sesuai dengan program-program yang dijalankan seperti contoh aktor media yakni Dueg Creative Channel dan lainnya.

Indikator *Access to Authority* (Akses Otoritas)

Access to authority merupakan ketersediaan ukuran atau ketentuan prosedur yang jelas serta dapat diterima secara luas. Dapat dikatakan bahwa terdapat aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh seluruh *stakeholder* untuk menjalankan peranannya sesuai kewenangan (DeSeve dalam Sudarmo, 2011). Desa sebagai penginisiasi adanya kerja sama dalam pengembangan desa wisata seharusnya sudah memiliki ketentuan prosedur yang jelas terhadap kewenangan setiap pihak pentahelix. Dalam menjalankan program-program desa wisata harus tetap berdasar pada aturan yang berlaku. Pihak pemerintah desa sebagai penginisiasi adanya kerja sama dalam pemerintah desa telah berperan aktif dalam menginisiasi adanya kerja sama. Telah diberikan kewenangan dengan jelas pada masing-masing *stakeholder* yang tergabung didalamnya. Dalam proses menjalankan program-program dalam pengembangan desa wisata, aktor-aktor pentahelix tetap melakukan koordinasi secara aktif dengan pemerintah desa.

Indikator *Distributive Accountability/Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas)

Akuntabilitas atau tanggung jawab distributif berkaitan dengan penataan, manajemen yang dilakukan oleh *stakeholder* dan berbagai keputusan tertentu kepada seluruh anggota jaringan serta berbagai tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diharapkan. Setiap *stakeholder* harus bertanggungjawab dan terlibat dalam pengambilan keputusan (DeSeve dalam Sudarmo, 2011). *Collaborative governance* berbasis pentahelix dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan di Desa Taro haruslah memenuhi tanggung jawab. Dalam pengembangan desa wisata di Desa Taro telah menyadari betul terkait apa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Terkait pemenuhan tanggung jawab di masing-masing pihak yang bekerjasama, pemerintah juga memiliki peran yakni kontrol dalam prosesnya guna mencapai tujuan bersama dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam proses kolaborasi. Segala bentuk tanggung jawab dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan di Desa Taro mengacu pada apa yang tertuang dalam kewenangan atau kesepakatan bersama baik pemerintah, akademisi, komunitas bisnis dan media secara bersama-sama menjalankan program masing-masing.

Indikator *Information Sharing* (Berbagi Informasi)

Information sharing merupakan keleluasaan akses bagi para anggota, perlindungan privasi, dan terbatas bagi yang bukan anggota selama semua pihak dapat menerimanya. Oleh karena itu, pembagian informasi yang jelas, dan kemudahan akses informasi yang bisa didapat oleh seluruh *stakeholder* yang terkait (DeSeve dalam Sudarmo, 2011). Dalam pelaksanaan kolaborasi akses maupun kemudahan untuk memperoleh informasi sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antar *stakeholder* yang terlibat di dalamnya. Dalam *collaborative governance* berbasis pentahelix dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan di Desa Wisata Taro, diperlukan adanya keterbukaan informasi baik terkait perencanaan program yang akan dijalankan, kendala atau permasalahan ataupun yang lainnya diantara masing-masing kolaborasi.

Dalam keterbukaan informasi dari pihak desa dalam pengembangan desa wisata sudah berjalan dengan baik dimana memanfaatkan teknologi seperti website desa (taro.desa.id), website Desa Wisata Taro (desawisatataro.com) dan media sosial seperti instagram, facebook, youtube maupun tiktok sebagai media transparansinya. Begitu pula antar aktor pentahelix, dalam proses kerja sama harus tetap memberikan kemudahan akses informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Terkait dengan kerja sama yang terjalin di antara *stakeholder* dalam hal ini yakni aktor pentahelix baik pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis dan media dalam pengembangan desa wisata sudah berjalan dengan baik. Desa Wisata Taro dalam upaya memberikan keterbukaan

informasi dengan para *stakeholder* yakni melalui media sosial serta website. Selain itu, pemerintah desa juga terbuka akan data-data yang berkaitan dengan desa wisata untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Begitu pula dari masing-masing aktor pentahelix seperti bisnis maupun komunitas dengan kesadaran mereka akan saling berbagi informasi yang berkaitan dengan program-program yang dijalankan serta dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut dengan saling menjaga privasi.

Indikator *Access to Resources* (Akses ke Sumber Daya)

Indikator *Access to Resources* mengisyaratkan ketersediaan sumber daya manusia, teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan dalam mencapai tujuan network. Kejelasan dan ketersediaan sumber daya bagi setiap *stakeholder* yang terlibat menjadi hal wajib dalam menjalankan kolaborasi. Dalam *collaborative governance* berbasis pentahelix dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan di Desa Wisata Taro untuk melihat sejauh mana ketersediaan dari sumber daya maka disini terdapat beberapa aspek yang diperhatikan baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya sarana prasarana. Pertama, terkait sumber daya alam dan budaya lokal di Desa Wisata Taro, mengingat bahwa Desa Taro memiliki begitu banyak potensi kekayaan alamnya serta budaya yang masih kental, hal inilah yang mampu menjadi daya tarik wisatawan. Namun, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dikhawatirkan dapat memberikan efek yang merugikan di masa depan.

Sumber daya manusia dalam pengembangan Desa Wisata Taro sejauh ini masih terdapat keterbatasan dalam hal kompetensi masyarakat pengelolanya. Banyak masyarakat yang lebih kompeten di dunia pariwisata lebih memilih untuk bekerja di luar desa. Walaupun bukan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang pariwisata, semangat masyarakat Desa Taro yang turut serta dalam pengembangan desa wisata merupakan orang-orang yang memiliki niat yang kuat. Hal inilah yang menjadi semangat dari pemerintah desa dalam menarik minat masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Sampai saat ini, Desa Wisata Taro masih terus berupaya dalam pengembangan desa wisata guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah Desa terus mengupayakan kerja sama dengan aktor-aktor pentahelix dalam pengembangan desa wisata. Selain itu, pihak desa tetap memperantarai dimana dengan memberikan dana desa dalam mendukung pengembangan desa wisata.

Diketahui pula terkait pendanaan memang dilakukan secara berkolaborasi antara pemerintah desa dengan pihak-pihak yang diajak bekerjasama. Pemerintah desa turut memberikan perhatian melalui anggaran APBDes dalam mendukung program-program dalam pengembangan desa. Kemudian, terlihat terkait sarana dan prasarana hingga saat ini sudah adanya pembenahan dan perbaikan. Sudah tersedia beberapa fasilitas umum penunjang kegiatan pariwisata seperti tempat makan, restoran dan lainnya. Namun, fasilitas-fasilitas yang sudah terdapat di Desa Wisata Taro masih perlu adanya penambahan kuantitas demi meningkatkan kualitas desa wisata. Serta terkait kendala lokasi desa yang cukup terpencil dengan tidak dapat dilalui oleh kendaraan besar seperti bus dengan muatan banyak. Untuk mengakali hal ini, Desa Wisata Taro memiliki solusi yakni dengan memanfaatkan inovasi transportasi masyarakat yakni Taro Transport untuk menjemput wisatawan-wisatawan yang hendak berkunjung ke Desa Wisata Taro. Selain itu, dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan di Desa Taro hingga saat ini, terkendala akan keterbatasannya mempromosikan desa wisata ke khalayak yang lebih luas.

Secara keseluruhan terkait akses ke sumber daya dimana Desa Wisata Taro diuntungkan dari segi alamnya dengan melihat berbagai potensi yang dimiliki. Masyarakat harus tetap mempertahankan keberlanjutan Desa Taro dengan tetap berpegang pada prinsip dasar yakni Tri Hita Karana dan dengan *tagline* desa wisatanya yakni *An Eco-Spiritual Destination* dalam memastikan keberlanjutan budaya. Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Wisata Taro hingga saat ini tergolong sudah adanya perbaikan dimana sudah mulai terdapat fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan kepariwisataan seperti toilet, restoran dan lainnya. Terkait sumber daya manusia, memang masyarakat di Desa Taro memiliki potensi yang sangat besar, namun masih perlu ditingkatkan guna menggali potensi-potensi dalam optimalisasi pengembangan Desa Wisata Taro. Selanjutnya, terlihat yang masih menjadi kendala dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan di Desa Wisata Taro. Masih kurang optimalnya pemasaran digital yang dilakukan guna mampu bersaing lebih luas lagi dipasaran. Keterbatasan akan promosi desa wisata ini besar harapannya kolaborasi yang terjalin antar lima aktor pentahelix dapat lebih maksimal dalam mempromosikan Desa Wisata Taro.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara keseluruhan melalui observasi lapangan, studi literatur dan wawancara yang penulis lakukan, adapun hasil dari *Collaborative Governance* Berbasis Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan (Studi Kasus: Desa Wisata Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar), adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil *Collaborative Governance* Berbasis Pentahelix

No	Indikator	Keterangan
1	<i>Networked Structure</i> (Struktur Jaringan)	Tidak adanya hirarki ataupun dominasi peran terkait <i>collaborative governance</i> berbasis pentahelix dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan di Desa Wisata Taro. Telah terbentuk struktur jaringan yang tegas dimana setiap aktor memiliki peranannya masing-masing
2	<i>Commitment to a Common Purpose</i> (Komitmen terhadap tujuan)	Setiap aktor yang tergabung dalam kolaborasi ini mempunyai tujuan yang sama, yakni pengembangan Desa Wisata Taro dengan mengoptimalkan potensi desa dan tetap mengedepankan konsep keberlanjutan dalam prosesnya. Komitmen ini dikuatkan dari adanya kerja sama baik secara <i>gentle agreement</i> maupun kerja sama tertulis berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) ataupun <i>memorandum of understanding</i> (MoU)
3	<i>Trust Among the Participants</i> (Kepercayaan di antara Peserta)	Kepercayaan diantara aktor pentahelix terlihat sudah terjalin. Adanya keterkaitan antara aktor pentahelix dimana membentuk hubungan profesional dalam menjalankan program atau tugas dan fungsi masing-masing
4	<i>Governance</i> (Pemerintah)	Aspek Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas telah berjalan dengan semestinya. Dalam kerja sama seluruh aktor mengetahui terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya, adanya keterbukaan dalam program-program yang dijalankan dengan tetap berkoordinasi dengan pihak pemerintah.
5	<i>Access to Authority</i> (Akses Otoritas)	Telah terdapat kejelasan otoritas dalam kolaborasi ini. Terlihat dalam hal ini pemerintah sebagai penginisiasi adanya kolaborasi telah berperan aktif dalam menginisiasi adanya kerja sama. Diberikan kewenangan yang jelas diantara aktor pentahelix dalam tupoksinya pada pengembangan desa wisata yang berkelanjutan di Desa Wisata Taro.
6	<i>Distributive Accountability/Responsibility</i> (pembagian Akuntabilitas/Tanggung Jawab)	Keseluruhan aktor pentahelix memiliki tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. Baik pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis dan media telah secara bersama-sama menjalankan program masing-masing.
7	<i>Information Sharing</i> (Berbagi Informasi)	Dalam kolaborasi sudah adanya keterbukaan informasi dan kemudahan akses, hal ini terlihat dari desa wisata yang telah memiliki website dan media sosial sebagai bentuk transparansi. Masing-masing aktor pentahelix dengan kesadaran mereka akan saling berbagi informasi yang berkaitan dengan program-program yang dijalankan serta dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut dengan menjaga privasi.
8	<i>Access to Resources</i> (Akses ke Sumber Daya)	Desa Wisata Taro memiliki potensi alam yang melimpah, kebudayaan yang masih kental merupakan modal kuat dalam pengembangan desa wisata. Sudah adanya perbaikan yang memadai terkait fasilitas penunjang kegiatan wisata. Namun, masih adanya kendala terkait sumber daya manusia yang masih perlu kembali ditingkatkan. Serta, diketahui bahwa pemasaran atau promosi Desa Wisata Taro masih kurang optimal.

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2024

Rekomendasi *Collaborative Governance* Berbasis Pentahelix dalam pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan di Desa Wisata Taro

Collaborative governance berbasis pentahelix dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan di Desa Wisata Taro terlihat memberikan dampak yang signifikan bagi desa wisata. Desa Wisata Taro dimana dalam perkembangannya dari ditetapkan sebagai desa wisata di tahun 2017 terhitung baru berjalan 7 (tujuh) tahun. Dalam waktu yang

cukup masih tergolong muda, pengembangan Desa Wisata Taro terlihat progres yang luar biasa. Dengan mengetahui fakta bahwa Desa Wisata Taro termasuk kedalam desa wisata kategori maju dan telah banyak mengukir prestasi serta menjadi desa wisata percontohan bagi desa wisata lainnya di Bali bahkan di Indonesia. Keberhasilan dari pengembangan Desa Wisata Taro sejauh ini tidak terlepas dari keberhasilan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis dan media. Kendati demikian, masih sangat diperlukan adanya perbaikan dalam kerja sama yang dilakukan demi mengoptimalkan kolaborasi pentahelix dalam pengembangan Desa Wisata Taro yang berkelanjutan. Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan yakni:

1. Mengingat bahwa pariwisata di Desa Taro di bangun sendiri dari bawah oleh masyarakatnya, dengan melihat pula perkembangan zaman yang serba modern. Menjadi tantangan kedepannya bagi para *stakeholder* untuk mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan kehidupan pedesaan seperti sekarang. Diharapkan bagi seluruh aktor pentahelix dapat memperkuat kembali tujuan dalam pengembangan desa wisata dalam memastikan keberlanjutan dengan tetap secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Taro terkait pentingnya menjaga keberlanjutan desa wisata. Menanamkan pemahaman bahwa dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi tidaklah mengubah pola masyarakat tradisional yang menjadi ciri khas dari Desa Wisata Taro.
2. Guna menjaga desa wisata dan memastikan aspek keberlanjutan, diharapkan pemerintah desa bersama-sama seluruh aktor pentahelix tetap menekankan dan menguatkan konsep dasar Tri Hita Karana dan mempertahankan *tagline* “*An Eco-Spiritual Destination*” sebagai identitas dari Desa Wisata Taro. Representasi *tagline* desa wisata “*An Eco-Spiritual Destination*” yakni destinasi berbasis alam dan spiritualitas kedalam program-program wisata yang dilakukan menjadi hal yang penting guna memastikan keberlanjutan dari Desa Wisata Taro.
3. Diharapkan untuk pemerintah desa bersama seluruh *stakeholder* atau aktor pentahelix yakni pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis dan media hendaknya bersama-sama mencari solusi terkait keterbatasan promosi desa wisata. Promosi yang tepat dalam pengembangan desa wisata dapat meningkatkan atensi wisatawan untuk berkunjung. Bagaimana promosi yang inovatif dan berkelanjutan dapat dijalankan mampu membawa Desa Wisata Taro lebih maju lagi. Diperlukannya memperkuat *branding* Desa Wisata Taro dengan *tagline* “*An Eco-Spiritual Destination*” guna memberikan ciri yang identik dengan Desa Wisata Taro. Melakukan promosi yang tepat sasaran dengan strategi untuk menarik wisatawan yang tertarik pada destinasi berkelanjutan dan spiritualitas. Membuat konten untuk desa wisata yang berkualitas tinggi dan mengikuti tren kekinian guna memancing wisatawan. Hal ini bisa dilakukan dengan merepresentasikan “*An Eco-Spiritual Destination*” dalam media-media promosi seperti media sosial, situs web, serta menggandeng media partner dalam memperluas aksesibilitas pemasaran guna meningkatkan visibilitas Desa Wisata Taro.

4. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dalam penelitian yang berjudul *Collaborative Governance* Berbasis pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata yang Berkelanjutan (Studi Kasus: Desa Wisata Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar) penulis menguraikannya melalui konsep ukuran keberhasilan *collaborative governance* oleh DeSeve (2007) dalam Sudarmo (2011), penulis menyimpulkan bahwa:

1. *Network Structure*, pada kolaborasi pentahelix dalam pengembangan Desa Wisata Taro telah terlaksana dengan baik, hal ini dilihat berdasarkan tidak adanya hirarki ataupun dominasi peran terkait *collaborative governance* berbasis pentahelix dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan di Desa Wisata Taro. Telah terbentuk struktur jaringan yang tegas dimana setiap aktor memiliki peranannya masing-masing.
2. *Commitment to a Common Purpose*, setiap aktor yang tergabung dalam kolaborasi ini mempunyai tujuan yang sama, yakni pengembangan Desa Wisata Taro dengan mengoptimalkan potensi desa dan tetap mengedepankan konsep keberlanjutan dalam prosesnya. Komitmen ini dikuatkan dari adanya kerja sama baik secara *gentle agreement* maupun kerja sama tertulis berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) ataupun *memorandum of understanding* (MoU).
3. *Trust Among the Participants*, kepercayaan diantara aktor pentahelix terlihat sudah terjalin. Adanya keterkaitan antara aktor pentahelix dimana membentuk hubungan profesional dalam menjalankan program atau tugas dan fungsi masing-masing.

4. *Governance*, aspek partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas telah berjalan dengan semestinya. Dalam kerja sama seluruh aktor mengetahui terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya, adanya keterbukaan dalam program-program yang dijalankan dengan tetap berkoordinasi dengan pihak pemerintah.
5. *Access to Authority*, Telah terdapat kejelasan otoritas dalam kolaborasi ini. Terlihat dalam hal ini pemerintah sebagai penginisiasi adanya kolaborasi telah berperan aktif dalam menginisiasi adanya kerja sama. Diberikan kewenangan yang jelas diantara aktor pentahelix dalam tupoksinya pada pengembangan desa wisata yang berkelanjutan di Desa Wisata Taro.
6. *Distributive Accountability/Responsibility*, Keseluruhan aktor pentahelix memiliki tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. Baik pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis dan media telah secara bersama-sama menjalankan program masing-masing.
7. *Information Sharing*, Dalam kolaborasi sudah adanya keterbukaan informasi dan kemudahan akses, hal ini terlihat dari desa wisata yang telah memiliki website dan media sosial sebagai bentruk transparansi. Masing-masing aktor pentahelix dengan kesadaran mereka akan saling berbagi informasi yang berkaitan dengan program-program yang dijalankan serta dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut dengan menjaga privasi.
8. *Access to Resources*, Desa Wisata Taro memiliki potensi alam yang melimpah, kebudayaan yang masih kental merupakan modal kuat dalam pengembangan desa wisata. Sudah adanya perbaikan yang memadai terkait fasilitas penunjang kegiatan wisata. Namun, masih adanya kendala terkait sumber daya manusia yang masih perlu kembali ditingkatkan. Serta, diketahui bahwa pemasaran atau promosi Desa Wisata Taro masih kurang optimal.

Dilihat berdasarkan ukuran keberhasilan *collaborative governance*, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dapat diketahui bahwa kolaborasi pentahelix dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan di Desa Wisata Taro telah berjalan cukup baik. Terlihat dari 8 (delapan) indikator, dimana tujuh indikator yakni *Networked Structure*, *Commitment to a Common Purpose*, *Trust Among The Participants*, *Governance*, *Access to Authority*, *Distributive Accountability / Responsibility* dan *Information Sharing* telah berjalan dengan baik dan semestinya. Sedangkan, untuk indikator *Access to Resources* masih terdapat hambatan atau tantangan dan masih belum optimal terkait pemanfaatan sumber daya. Secara keseluruhan terkait kolaborasi yang telah berjalan dalam pengembangan Desa Wisata Taro tentunya masih perlu ditingkatkan kembali konsistensi baik koordinasi maupun program-program yang dilaksanakan agar tetap mengacu pada tujuan bersama yakni pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Taro.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat penulis berikan untuk menguatkan kolaborasi berbasis pentahelix dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan di Desa Wisata Taro yakni sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Taro sebagai penginisiasi adanya kerja sama dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan harus tetap mengoptimalkan dan mensinergikan antar aktor pentahelix. Diharapkan pula dapat meningkatkan kerja sama dibidang pemasaran atau promosi desa wisata guna menciptakan sarana promosi yang tepat dan optimal. Mensinergikan seluruh aktor dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang melalui pemberdayaan dan sosialisasi secara rutin dan konsisten.
2. Kepada pihak akademisi dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan di Desa Taro senantiasa dapat melakukan pendampingan, pelatihan, pembinaan, penelitian serta evaluasi guna mendukung pengembangan desa wisata untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.
3. Kepada aktor komunitas baik internal desa yakni komunitas-komunitas yang terdapat di Desa Taro maupun pihak-pihak komunitas eksternal diharapkan tetap selalu berkoordinasi dan berinovasi dalam peningkatan produk-produk wisata di Desa Taro bersama pemerintah desa.
4. Kepada aktor bisnis, diharapkan dapat selalu menjaga keharmonisan dengan berbagai pihak dalam menggali dan memasarkan produk-produk wisata di Desa Wisata Taro serta turut termotivasi untuk lebih aktif dalam mempromosikan Desa Wisata Taro.
5. Kepada aktor media, diharapkan dapat lebih aktif lagi dan berinovasi kembali terkait cara promosi desa wisata. Semakin diperkuat terkait *branding* desa wisata guna memberikan ciri khas dari Desa Wisata Taro dan dapat menjadi pembeda dari destinasi-destinasi lainnya.
6. Kepada Peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini sehingga diperoleh temuan yang semakin optimal sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kedepannya.

Daftar Pustaka

- Bargandini, A. A. I. S., & Arsawati, N. N. J. (2022). Optimalisasi Media Sosial Dalam Upaya Promosi Desa Wisata di Desa Kenderan, Tegallalang, Gianyar. *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 1-7.
- Fajar, N. M. A. P., Diasa, I. W., & Adiandari, A. M. (2021). Pengembangan Desa Wisata Taro berbasis digital marketing sosial media. *Penamas: Journal of Community Service*, 1(2), 116-124.
- Fasa, A. W. H., Berliandaldo, M., & Prasetyo, A. (2022). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan di Indonesia: Pendekatan Analisis PESTEL. *Kajian*, 27(1), 71-88.
- Greenwood, S., Singer, L., & Willis, W. (2021). *Collaborative governance: Principles, processes, and practical tools*. Routledge.
- Hardi, W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik.
- Hendriyani, I.G.A.D., 2023. Siaran Pers: Indonesia Raih Penghargaan “Best Tourism Village 2023” dari UNWTO. Url: [Siaran Pers: Indonesia Raih Penghargaan “Best Tourism Village 2023” dari UNWTO](https://kemenparekraf.go.id) (kemenparekraf.go.id). Diakses pada 01 Januari 2024
- Jatmiko, B.P. 2022. Keunikan Desa Taro di Gianyar yang Mampu Gerakkan Perekonomian Warga. Url: <https://umkm.kompas.com/read/2022/06/30/101619583/keunikan-des-taro-di-gianyar-yang-mampu-gerakkan-perekonomian-warga?page=all>. Diakses pada 07 September 2023
- Jeelani, P., Shah, S. A., Dar, S. N., & Rashid, H. (2023). Sustainability constructs of mountain tourism development: The evaluation of stakeholders’ perception using SUS-TAS. *Environment, Development and Sustainability*, 25(8), 8299-8317.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish.
- Novianti, K. R. (2021). Maximizing Bali Village Tourism Potential Using Penta-Helix Model. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1), 86-92.
- Nv. 2021. Desa Wisata Taro Raih Anugerah Desa Wisata Tersertifikasi Berkelanjutan. Url: <https://www.nusabali.com/berita/108236/desa-wisata-taro-raih-anugerah-desa-wisata-tersertifikasi-berkelanjutan>. Diakses pada 15 September 2023
- Oktaviarni, R. (2023). Analisis Pengembangan Desa Wisata Berbasis Penta Helix di Desa Jambu Kabupaten Kediri:(Studi pada Desa Wisata Jambu Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(1), 21-30.
- Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- Prakoso, A. A. (2022). Konsep Dan Teori Desa Wisata.
- Pugra, I. W., Oka, I. M. D., & Suparta, I. K. (2021). Kolaborasi Pentahelix Untuk Pengembangan Desa Timpag Menuju Desa Wisata Berbasis Green tourism. *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 7(2), 111-120.
- Purnomo, E. P., Ramdani, R., Setyadiharja, R., & Muzwardi, A. (2018). *Collaborative governance dalam tata kelola hutan berbasis masyarakat*. Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Purwowidhu. 2023. Kian Melesat di 2023, Pariwisata Indonesia Bersiap Menuju Level Prapandemi. Url: <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kian-melesat-di-2023-pariwisata-indonesia-bersiap-menuju-level-prapandemi>. Diakses pada 03 September 2023
- Rizal, R. K., Minanda, H., Budiatiningsih, M., Rojabi, S. H., Ulya, B. N., & Hulfa, I. (2022). KETERLIBATAN UNSUR PENTAHILIX DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA BATU KUMBUNG. *Media Bina Ilmiah*, 17(4), 605-614.
- Rosardi, R. G. (2020). Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, 4(2), 7-17.

- Saragih, M. G., & SE, M. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
SK Bupati Gianyar Nomor 429/E02?HK/2017 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Gianyar
- Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Solo: SmartMedia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukaris, S., Kurniawan, A., & Kurniawan, M. D. (2023). Strategi Pengembangan Wisata Desa Yang Berkelanjutan. *Jurnal Manajerial*, 10(01), 17-36.
- Sulistiyadi, Y., Eddyono, F., & Entas, D. (2019). *Indikator perencanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan*. Anugrah Utama Raharja.
- Tangian, D., & Kumaat, H. (2020). Buku Ajar Pengantar Pariwisata. *Buku Ajar*, 1-153.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- VU, H. M., LAM, T. M., & PRABHAKARAN, S. (2021). Perceptions of key stakeholders towards sustainable tourism development: A case study in Mekong Delta, Vietnam. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 717-726.
- Warka, I.W, dkk (2022). *Pengembangan Desa Wisa Taro An Eco-Spiritual Destination*. Denpasar: Paramita
- Wijaya, N. S., Sudarmawan, I. W. E., & Sukaarnawa, I. G. M. (2021). Community base tourism untuk menunjang pariwisata berkelanjutan di kawasan desa wisata taro, tegallalang, gianyar bali. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 11(2), 90-100.
- Wirawan, P. E., & Octaviany, V. (2022). *Pengantar Pariwisata*. Nilacakra.
- Yacob, S., Qomariyah, N., Marzal, J., & Maulana, A. (2021). *Strategi Pemasaran Desa Wisata*. WIDA Publishing.
- Yuni, H. K., Ardani, N. N., Bili, M. Y., & Kurnia, T. I. (2023). Pemberdayaan UMKM Berbasis Potensi Alam dalam Menunjang Pengembangan Desa Wisata Taro Menuju Pariwisata Berkelanjutan. *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 9(1), 16-25.
- Yuniar, N., 2021. Kemenparekraf siapkan desa wisata Taro Gianyar-Bali terima wisatawan. Url: <https://bali.antaranews.com/berita/239914/kemenparekraf-siapkan-desa-wisata-taro-gianyar-bali-terima-wisatawan>. Diakses pada 03 September 2023